ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PADA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:

Candra Budi Priatama

11 15 28140

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2020

SKRIPSI

ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PADA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

CANDRA BUDI PRIATAMA

No Induk Mahasiswa: 111528140

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 3 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I

Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

Pembimbing II

Dheni Indra Kusuma,SE., M.Si., Ak.

Penguji

Endang Setyowati, Dra., M.Si.

Yogyakarta, 3 September 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PADA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penyusunan anggaran perangkat daerah pada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, 2) pelaksanaan anggaran perangkat daerah pada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukan: 1) Penyusunan anggaran perangkat daerah telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 2) Pelaksanaan dan penggunaan anggaran sudah baik dan terstruktur sesuai analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja, penggunaan anggaran sudah efektif dibuktikan presentase 96,37% dan sudah efisien dibuktikan presentase 57,10%

Kata kunci: penyusunan, pelaksanaan, anggaran.

ANALYSIS OF THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL APPARATUS BUDGETS AT BAPPEDA GUNUNGKIDUL REGENCY

The purpose of this research is to acknowledge: 1) the preparation of apparatus budgets at BAPPEDA Gunungkidul Regency, 2) implementation of regional apparatus budgets at BAPPEDA Gunungkidul Regency.

This research uses qualitative approach. Data collection techniques uses primary data through interviews and secondary data using budget implementation documents. The results showed: The preparation of regional apparatus budgets is in accordance with the prevailing laws and regulations. 2) The implementation and use of the budget is good and structured according to the analysis of the variance of expenditures and the analysis of the growth of expenditures, the use of the budget is effective, proven by a percentage of 96.37% and efficient, proven by a percentage of 57.10%.

Keywords: preparation, implementation, budget.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. PENDAHULUAN

Menurut Mardiasmo (2009) Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang mempunyai peranan sangat penting dan aktivitasnya berkaitan dengan usaha demi menghasilkan barang serta pelayanan publik dalam rangka memberi dan mewujudkan kebutuhan dan hak publik.

Pembangunan di masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang selalu berbeda, dikarenakan potensi serta kebutuhan setiap daerah tidak sama. Seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai wewenang pemerintah daerah dalam mengatur serta menyelenggarakan urusan pemerintah daerah sesuai asas otonomi dan prinsip otonomi seluas-luasnya. Maka dari itu pemerintah daerah membutuhkan perangkat daerah untuk membuat progam dan kegiatan demi tercapainya tujuan masing-masing daerah.

Mengingat tentang hal tersebut maka pemerintah mengupayakan untuk memberikan kemajuan pembangunan daerah dengan cara dibentuknya sebuah badan atau instansi yang berperan penting guna menangani perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan Presiden No.27 tahun 1980 mengenai pembentukan BAPPEDA. Badan ini adalah lembaga teknis daerah yang bertugas sebagai badan perencanaan pembangunan daerah dengan cara melakukan penelitian. BAPPEDA menjalankan tugas pokok sebagai pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pada bidang penelitian serta perencanaan untuk kemajuan pembangunan di daerah.

Pembangunan daerah selalu berhubungan dengan penggunaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajibanya sendiri dalam pengelolaan keuangan atau finansial daerah. Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005).

Anggaran adalah alat penting yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk merencanakan serta mengendalikan suatu organisasi jangka pendek (Nafarin, 2013). Anggaran mengganbarkan semua kegiatan suatu organisasi yang terbilang dalam satuan moneter atau uang dan berlaku pada periode tertentu yang akan datang. Dalam sektor publik anggaran dimuat dalam sebuah arsip atau dokumen yang menjelaskan bagaimana keadaan finansial sebuah organisasi yang berisi laporan meliputi pendapatan dan belanja serta kegiatan organisasi atau instansi. Mardiasmo (2009) memaparkan bahwa anggaran publik merupakan rencana atau program yang dijelaskan kedalam bentuk rencana memperoleh pendapatan dan melakukan belanja dalam satuan uang.

Realisasi anggaran terkini merupakan hal yang perlu dikaji ulang. Dalam hal ini, dapat diartikan apakah alokasi dana yang ada sudah digunakan dengan baik dan seperti bagaimana semestinya. Dengan perbandingan anggaran dan realisasi anggaran terkini yang aktual dapat dilihat keefektivitasaan dan keefisienan suatu operasi. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) mampu menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan daerah.

Keefektifan dan keefisienan keuangan atau finansial daerah, dinilai dengan cara menghitung perbandingan dari keduanya. Menurut Mardiasmo (2009:132) tercapainya tujuan serta target kebijakan (hasil guna) selalu berkaitan dengan efektif. Interaksi antara keluaran dan pencapaian tujuan atau sasaran merupakan

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

efektivitas. Proses pencapaian tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wisely)* dapat tercapai sehingga kegiatan operasional dikatakan efektif. Sementara efisiensi sangat berkaitan dengan konsepsi produktivitas. Perbandingan antara output yang diwujudkan dengan input yang dipakai *(cost of output)* mampu mengukur dan menghasilkan efisiensi. Suatu hasil kerja jika dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya *(spending well)* mampu menjadikan tahap kegiatan operasional menjadi efisien.

Dengan demikian, BAPPEDA Gunungkidul merupakan unsur yang berfungsi sebagai penunjang pemerintahan, daerah berperan sangat penting sebagai badan yang mampu melakukan analisis dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah dengan menggunakan anggaran yang sesuai. Namun dalam praktiknya, sering terjadi beberapa hambatan dari sistem penganggaran tersebut sehingga kurang efektif dan efisien. Selain itu, dalam pembangunan daerah perlu adanya kordinasi vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dengan harapan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul lebih maju sesuai dengan visi dan misi serta tujuan bersama.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa perencanaan dan pengawasan mampu diukur dengan anggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam sehingga melaksanakan penelitian dan memaparkan sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul" Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu, **b**agaimana proses penyusunan anggaran perangkat daerah (DPA-PD) dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul dengan metode analisis varians, analisis pertumbuhan belanja serta dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan anggaran perangkat daerah (DPA-PD), mengetahui efisiensi belanja, pertumbuhan belanja dan keefektivan dan keefisiensian dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Analisis, Penyusunan, dan Pelaksanaan

Menurut Wiradi (2009), analisis merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi aktivitas mengurai, memilah, membadakan sesuatu untuk dirumpun serta dikelompokan sesuai kriteria yang ada untuk dikaikan dan ditaksir maknanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelompok atau kumpulan tidak terlalu banyak merupakan arti dari kata penyusunan yang berasal dari kata dasar susun, yaitu berarti penyusunan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengolah atau mengimplementasikan sebuah data atau kumpulan dari beberapa data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur.

Menurut Hanifah Harsono (2002) pelaksanaan merupakan sebuah usaha untuk melaksanaan kebijakan menjadi sebuah tindakan kebijakan dari politik ke

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

administrasi. Dengan kata lain pelaksanaan bisa dikatakan proses pengembangan kebijakan untuk menyempurnakan sebuah program atau kegiatan.

B. Anggaran

Menurut Munandar (2006) rencana yang tersusun secara sistematis berupa sebuah aktivitas perusahaan yang dinyatakan kedalam unit (kesatuan) uang atau moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang merupakan sebuah konsep anggaran

Menurut Mulyadi (2006) ada beberapa ciri-ciri anggaran sebagai berikut.

1. Anggaran harus dijelaskan kedalam satuan uang (moneter) dan satuan selain keuangan (non moneter).
2. Anggaran secara umum harus mencakup jangka waktu tertentu.
3. Anggaran meliputi komitmen dan kemampuan manajemen, yaitu manajer menyetujui dan menerima tanggung jawab demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran.
4. Setelah sekali dalam persetujaun, anggaran hanya dapat diubah dalam keadaan tertentu.
5. Secara berkala, kinerja keuangan sesudah dibandingkan dengan anggaran maka hasilnya harus dianalisis kemudian dijelaskan. .

Menurut Nafarin (2006) anggaran bisa diklafisifikasikan kedalam bagian atau prespektif sebagai berikut.

a) Sesuai dasar penyusunannya
b) Sesuai dengan bagaimana langkah penyusunannya
c) Sesuai berapa lama jangka waktunya
d) Sesuai bidangnya
e) Sesuai kemampuan dalam menyusun
f) Sesuai beberapa fungsinya

Penyusunan anggaran pada dasarnya juga memiliki tujuan utama sebagai penyedia informasi kepada pihak manajemen suatu perusahaan dan dijadikan dalam proses pengambilan keputusan dalam jalanya perusahaan. Adapun beberapa tujuan dalam penyusunan anggaran Sansongko dan Parulian (2013) meliputi, perencanaan, koordinasi, motivasi, dan pengendalian

Kemudian menurut ahli lain ada beberapa manfaat tujuan penyusunan anggaran. Ada beberapa manfaat penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013).

a. Tercapainya segala tujuan bersama dalam kegiatan perusahaan secara terarah.
b. Anggaran dijadikan sebagai instrument dalam menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
c. Anggaran mampu memberikan motivasi bagi pegawai.
d. Anggarn mampu menyempurnakan rencana ysng disusun perusahaan, karena dengan adanya anggaran tujuan perusahaan menjadi lebih transparan dan nyata.

Proses penyusunan anggaran dibagi berdasarkan beberapa tahapan sebagai berikut (Nafarin, 2013).

1. Anggaran sebagai Penentuan dan Pedoman
2. Mempersiapkan Anggaran
3. Tahap Penentuan Anggaran
4. Pelaksanaan Anggaran

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ada metode yang sangat beragam dalam menyusun anggaran, hal ini berdasarkan ketetapan dari sebuah organisasi yang menjalankan dan orang yang memiliki tanggung jawab atas penyusunan anggaran tersebut.

Terdapat beberapa tahap yang digunakan dalam penyusunan sebuah anggaran (Harahap, 2008)

1. *Otoriter atau Top Down*
2. *Demokrasi atau bottom up*
3. *Gabungan antara Top Down dan Bottom Up*

Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang mendeskripsikan berapa biaya yang daa atas rencana-rencana yang dibuat, seperti pengeluara atau biaya. Kemudian juga menggambarkan cara mendapatkan uang demi mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan berisi berbagai penjelasan mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, transfer, surplus, atau defisit pembiayaan serta sisa lebih atau kurannya pembiayaan anggaran, kemudian masing-masing dibandingkan terhadap anggarannya pada suatu periode tertentu. Ikhtisar sumber dan alokasi serta pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang mendeskripsikan rasio antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

C. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) adalah dokumen yang berisi pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran (Permendagri 13 tahun 2006, Permendagri 59/2007, dan Permendagri 21/2001).

Permendagri No. 21 tahun 2011 perubahan kedua dari Permendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Berikut uraian susunan dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Permendagri No. 13 tahun 2006).

1. SKPD menyusun DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan, Perda APBD dan Per KDH Penjabaran,
2. Rincian DPA Pendapatan SKPD disusun oleh setiap SKPD untuk menghasilkan DPA-SKPD 1.
3. Rincian DPA Belanja Tidak Langsung SKPD disusun oleh setiap SKPD untuk menghasilkan DPA-SKPD 2.1
4. Rincian DPA Belanja Langsung dari masing-masing kegiatan disusun oleh SKPD untuk menghasilkan DPA-SKPD 2.2.1. SKPD untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian DPA Belanja Langsung untuk menghasilkan DPA-SKPD 2.2.
5. Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah disusun oleh setiap SKPD yang bertindak sebagai SKPKD untuk menghasilkan DPA-SKPD 3.1.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah disusun oleh SKPD yang bertindak sebagai SKPKD untuk menghasilkan DPA-SKPD 3.2.
7. Dokumen-dokumen DPA-SKPD diatas dikompilasi oleh SKPD sehingga menjadi Rancangan DPA-SKPD. Membuat rancangan Anggaran Kas berdasarkan Rancangan DPA-SKPD yang ada.

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan validasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memperhitungkan jumlah anggaran tiap-tiap kegiatan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan membandingkan dengan kemampuan finansial daerah serta program-program pembangunan yang ada. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengurangi jumlah anggaran yang diajukan kemudian disetujui oleh Seketaris Daerah (Sekda) jika kurang sesuai atau terdapat keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Dokumen disahkan dan diserahkan kepada SKPD paling lambat selama 7 hari kerja, hal ini dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran (Permendagri No. 13 tahun 2006).

D. **Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Terdapat adanya azas umum pengelolaan keuangan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan azas tersebut dalam menjalankan belanja daerah meliputi, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-ungdangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat luas (Permendagri Nomor 21 tahun 2011 pembaruan kedua dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006).

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan serta penjabaran program-program. Penjabaran kebijakan dan program-program Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi tercapainya upaya yang meliputi beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terencana berdasarkan dengan visi misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan penjabaran dari belanja tidak langsung (Permendagri Nomor 13 tahun 2006).

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif/kualitatif, makna lebih ditekankan daripada generalisasi pada hasil penelitian kualitatif ini (Sugiyono, 2019)

Mendeskripsikan data keuangan berupa laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Bappeda Gunungkidul dengan penjelasan

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

secara kualitatif yang didasarkan pada hasil wawancara dan Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Satria nomor 3 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada 1 April 2020

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan pikah-pihak yang berpartisipasi sebagai pemberi informasi penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini merupakan Kepala Sub Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Objek penelitian adalah data penguat terhadap penelitian yang diteliti. Adapun objek penelitian ini berupa Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dijadikan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan agar lebih akurat. Teknik pengumpulan data membutuhkan data anggaran dan data wawancara agar pengerjaan dan pemgumpulan data lebih mudah. Tujuannya dari penggunaan data tersebut agar mendapatkan data yang tepat dan valid (Arikunto, 2006).

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara melalui hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara meninjau pada Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Metode Pengumpulan data yang dilaksanakan sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara ditujukan langsung kepada narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Hal ini diharapkan adanya bukti yang konkrit dan signifikan terkait dengan topik yang dibahas

2. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terkait dengan masalah pokok dalam objek yang diteliti secara langsung.

3. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Operasional Variabel dan Teknik Analisis

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa terdapat batasan operasional yang dapat digunakan sebaagai tolak ukur sebuah kinerja anggaran yang meliputi beberapa analisis. Batasan operasional variabel yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Analisis Kinerja	Penjelasan	Rumus	Keterangan
1.	Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)	Analisis ini berdasarkan perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.	$AVB = RB - AB$	AVB = Analisis Varians Belanja RB = Realisasi Belanja AB = Anggaran Belanja
2.	Analisis Pertumbuhan Belanja	Analisis ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun dengan hasil positif atau negatif yang umumnya mempunyai kecenderungan selalu naik. Naiknya belanja terjadi karena disebabkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan pada faktor makro ekonimi serta inflasi	$PB\ Thn_t = \frac{RB\ Thn_t - RB\ Thnt_{t-1}}{RB\ Thn_{t-1}} x\ 100\%$	PB = Pertumbuhan Belanja Thn_t /Thn_t-1 = Tahun saat ini/ tahun sebelumnya B = Belanja RB = Realisasi Belanja
3.	Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja	Pengukuran tingkat anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi angka efektif dan efisiensi yang tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Tidak terdapat standar baku yang bagus, tetapi dapat dikatakan belanja daerah lebih efektif dan efisien dari tahun sebelumnya. Dalam efektivitas rasio yang menunjukan angka 100% maka sangat efektif begitu juga sebaliknya.	Efektivitas $R = \frac{RAB\ x\ 100\%}{AB}$ Efisiensi $R = \frac{RABL\ x\ 100\%}{RAB}$	R = Rasio AB =Anggaran Belanja RAB = Realisasi Anggaran Belanja RABL = Realisasi Anggaran Belanja Langsung

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Proses dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pada permendagri No. 21 tahun 2011. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan dokumen yang mendasari kepala SKPD dalam melaksanakan anggaran. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangakat Daerah disusun untuk mencapai sasaran program atau kegiatan dan melaksanakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Renova Cipta Anggoro, S.TP selaku Kasubbag Perencanaan dan Bapak Wahyu Ardi Nugroho, S.STP, MA selaku Kepala Bidang Perencanaan maka terdapat langkah–langkah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangakat Daerah pada BAPPEDA Kab. Gunungkidul adalah sebagai berikut

Tabel 2. Proses Penyusunan DPA-PD

No	Proses Penyusunan DPA-PD	Permendagri No 21 tahun 2011	Kesimpulan
1.	BAPPEDA Kab. Gunungkidul menyusun rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang merupakan hasil dari penjabaran (*breakdown*) tahunan dari rencana strategi (Renstra) untuk diserhakan kepada kepala pemrintah daerah.	Surat Pemberitahuan tentang penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Derah (DPA-SKPD) sesuai dengan rencana kerja (Renja)	Proses yang dilakukan instansi sudah sesuai dengan peraturan yang ada
2.	BAPPEDA Kab. Gunungkidul menyusun rancangn Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan menyusun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Sesuai peraturan Kepala Pemerintah Daerah mengenai penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun berikutnya.	Proses yang dilakukan instansi sudah sesuai dengan peraturan yang ada
3.	BAPPEDA Kab. Gunungkidul menyususn Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	SKPD menyususn RKA-SKPD tahun berikutnya.	Proses yang dilakukan instansi sudah sesuai dengan peraturan yang ada
4.	BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul menyampaikan Rencana	Sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah RKA-	Proses yang dilakukan instansi sudah sesuai

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).	SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	dengan peraturan yang ada
5.	BAPPEDA Kab. Gunungkidul menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)	Proses yang dilakukan instansi sudah sesuai dengan peraturan yang ada
6.	Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)	Dilakukan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh TAPD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Proses yang dilakukan instansi sudah sesuai dengan peraturan yang ada
7.	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Derah (DPA-PD)	Pimpinan pemerintah daerrah mengesahkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah (DPA-PD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah (SEKDA).	Proses yang dilakukan instansi sudah sesuai dengan peraturan yang ada

Pembahasan Analisis Varians Belanja

Batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah merupakan ketentuan dalam anggaran belanja. Penilaian baik atau tidaknya kinerja belanja pemerintah daerah berdasarkan pada realisasi belanja yang tidak melebihi dari anggaran yang telah di anggarkan. AnalisisVarians Belanja merupakan pengurangan yang dilakukan antara realisasi belanja yang aktual terhadap anggaran yang terdapat dalam tahun anggaran dan tersedia di tahun anggaran tersebut. Rumus untuk perhitungan analisis varians belanja sebagai berikut.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 2016 – 2019 (Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung
2016	6.717.954.665,81	6.569.362.912	3.786.765.950	3.682.739.504
2017	7.833.786.944,79	7.345.199.950	4.695.982.400	4.284.076.251
2018	7.467.372.750	7.277.073.678	4.253.695.000	4.037.646.913
2019	7.860.932.997	7.661.522.214	4.588.878.400	4.472.681.677

.

Tabel 4. Tabel Analisis Varians Belanja (Dalam Satuan Rupiah) Tahun Anggaran 2016 – 2019

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih	Perbandingan
2016	6.569.362.912	6.717.954.665,81	148.591.754	97,79%
2017	7.345.199.950	7.833.786.944,79	488.586.995	93,76%
2018	7.277.073.678	7.544.806.529,07	267.732.851	96,45%
2019	7.661.522.214	7.860.932.997	199.410.783	97,46%

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dengan melihat dari seluruh perubahan dari 2016-2019 penyerapan dalam menggunakan anggaran dapat dikatakan efisisien dan signifikan karena presentase nya selalu naik. Mengalami penurunan pada tahun 2017 tetapi pada dasarnya kinerja anggaran pada tahun tersebut dapat dikatakan baik, artinya terdapat penghematan anggaran yang dilakukan pada tahun tersebut. Di tahun selanjutnya penyerapan penggunaan anggaran terus membaik, secara umum dapat dikatakan bahwa instansi melakukan perencanaan anggaran dengan baik dan terstruktur sehingga penggunaan anggaran terserap dengan tepat sasaran sesuai program yang telah dirancang sebelumnya.

Pembahasan Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis Pertumbuhan Belanja digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun dengan penilaian positif ataupun negatif. Berikut cara pengukuran kinerja menggunakan rumus analisis pertumbuhan belanja.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5. Tabel Analisis Pertumbuhan Belanja (Dalam Satuan Rupiah) Tahun Anggaran 2016 – 2019

Keterangan	2016 – 2017	2017 - 2018	2018 – 2019
Realisasi Belanja tahun $_{t-1}$	6.569.362.912	7.345.199.950	7.277.073.678
Realisasi Belanja tahun $_{t}$	7.345.199.950	7.277.073.678	7.661.522.214
Kenaikan/Penurunan	775.837.038	(68.126.272)	384.448.536
(%)	11,81%	(0,93%)	5,28%
Hasil	Positif	Negatif	Positif

Dari tabel analisis pertumbuhan belanja di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan anggaran belanja sebesar Rp775.837.038 dengan presentase kenaikan positif sebesar 11,81% dari Pagu anggaran. Pada tahun 2017 tercatat bahwa terdapat penrunan anggaran belanja terbilang sebesar Rp68.126.272 atau dalam presentase menunjukan negatif sebesar 0,93% dari Pagu anggaran yang terdapat pada realisasi belanja tahun 2017. Di tahun selanjutnya tahun dasar 2018 terdapat kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya dalam anggaran belanja sebesar Rp384.448.536 dengan presentase kenaikan positif sebesar 5,28% dari Pagu anggaran

Artinya terdapat kenaikan dan penurunan anggaran belanja dalam analisis pertumbuha belanja. Hal ini disebabkan karena kebutuhan belanja instansi setiap tahun anggaran belanja selalu berbeda, maka dari itu anggaran yang disediakan dari setiap Pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan belanja langsung, belanja tidak langsung tahun berjalan tersebut.

Pembahasan Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja

Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja digunakan untuk mengetahui penghematan belanja atau keefektivan dan keefisienan dari tahun ke tahun dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang ada. Pengukuran kriteria dalam rasio efektivitas dan rasio efisiensi anggaran didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996.

Tabel 6. Kriteria Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 7. Kriteria Efisiensi

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Tabel 8. Analisis Rasio Efektivitas Belanja (Dalam Satuan Rupiah) Tahun Anggaran 2016 – 2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)
2016	6.717.954.665,81	6.569.362.912	97,79%
2017	7.833.786.944,79	7.345.199.950	93,76%
2018	7.544.806.529,07	7.277.073.678	96,45%
2019	7.860.932.997	7.661.522.214	97,46%

Pada tahun dengan rasio presentase tertinggi dari keempat tahun anggaran sebesar 97,79%. Berdasarkan keterangan tersebut mengacu pada penetapan kriteria rasio efektivitas di tahun 2016 dapat dikatakan efektif. Tahun 2017 sebesar 93,76% sesuai kriteria tabel efektivitas masih dikatakan efektif. Tahun 2018 menunjukan presentase sebesar 96,45%. sehingga dikatakan efektif. Pada tahun terakhir presentase sebesar 97,46% dikatakan masih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 sampai dengan 2019 rata-rata sudah berjalan efektif. Presentase efektivitas mengalami naik turun dari tahun ke tahun tetapi masih pada taraf efektif sehingga tidak begitu bermasalah. Anggaran dari Pemerintah Daerah telah direalisasikan sesuai target dengan selisih tidak terlalu jauh terhadap anggaran tersedia sehingga seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Tabel 9. Analisis Rasio Efisiensi Belanja (Dalam Satuan Rupiah) Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi	Realisasi Belanja Langsung	Rasio Efisiensi (%)
2016	6.569.362.912	3.682.739.504	56,06%
2017	7.345.199.950	4.284.076.251	58,32%
2018	7.277.073.678	4.037.646.913	55,48%
2019	7.661.522.214	4.472.681.677	58,38%

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan tabel diatas di tahun 2016 menunjukan realisasi anggaran belanja langsung sebesar dengan rasio presentase 56,06% sehingga dikatakan sangat efisien. Tahun 2017 menunjukan presentase sebesar 58,32% dari realisasi anggaran. Tahun 2018 menurunkan tingkat efisiensi tetapi masih dikatagorikan sangat efisien dengan rasio 55,48% Tahun 2019 dengan presentase sebesar 58,38%. direalisasikan dalam belanja langusng tetapi dalam pelaksanaanya masih dikatakan sangat efisien. Berdasarkan penjelasan di atas, mampu disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran sangat efisien, dibuktikan oleh tabel kesimpulan Analisis Rasio Efisiensi menunjukan presentase di bawah 60%. Seluruh program yang dijalankan oleh BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul telah tercapai dengan maksimal. Artinya menggunakan dana seminimal mungkin BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan program yang telah direncanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses penyusunan yang sudah sesuai adalah tahapan yang dilakukan pertama dengan penyusunan RENJA yang merupakan penjabaran tahunan dari RESTRA yang nantinya diserahkan kepada Kepala Pemda. Selanjutnya BAPPEDA menyusun rancangan KUA dan menyusun PPAS sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya proses penyusunan RKA-SKPD kemudian disampaikan kepada BKAD. Setelah disetujui baru BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dan jika sudah selesai DPA-PD akan diverifikasi keabsahannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Baru setelah semuanya selesai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) dapat disahkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD), BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul sudah melakukan tahapan-tahapan penyusunan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul dilihat dari varians belanja sudah berjalan baik, karena presentase nya selalu naik dari keempat tahun berjalan. Hanya mengalami penurunan sebesar 4,03% pada tahun 2017 artinya ada penghematan anggaran yang dilakukan BAPPEDA serta menyesuaikan estimasi belanja pada tahun tersebut. Di tahun selanjutnya 2018-2019 penyerapan penggunaan anggaran terus membaik, secara umum dapat dikatakan bahwa instansi melakukan perencanaan anggaran dengan baik dan

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terstruktur sehingga penggunaan anggaran terserap dengan tepat sasaran sesuai program yang telah dirancang sebelumnya.

3. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul dari segi Pertumbuhan Belanja mengalami pasang surut. Di tahun 2016-2017 tingkat pertumbuhan belanja berada pada presentase positif 11,81%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017-2018 sebesar negative 0,93%. Pada tahun terakhir 2018-2019 ada kenaikan pertumbuhan belanja pada BAPPEDA Kab. Gunungkidul sebesar positif 5,28% dari Pagu anggaran. Pertumbuhan belanja yang terjadi pada BAPPEDA Kab. gunungkidul disebabkan oleh penyerapan anggaran yang tersedia setiap tahun tidaklah sama, artinya berdasarkan prioritas kegiatan pembangunan dan estimasi belanja setiap tahun. Kenaikan yang positif disebabkan oleh penyesuaian laju inflasi pada tahun tersebut dan penurunan negatif biasanya adanya kelemahan dalam kinerja tetapi bias dikatakan baik karena prioritas belanja yang belum dilaksanakan pada tahun tersebut dapat dialihkan untuk prioritas belanja yang lebih penting.
4. Pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul dilihat pada segi efektifitas pada tahun 2016-2019 secara keseluruhan sudah efektif. Dilihat dalam presentase tertinggi pada tahun 2016 mencapai 97,76% dan kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2017 di presentase 93,76% tetapi masih tergolong efektif. Tahun 2018 dan Tahun 2019 mengalami fluktuasi yang cukup stabil pada angka 96,45% dan 97,46% pada kategori efektif. Berdasarkan data tersebut jika dibuat rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan presentase 96,37% atau tergolong efektif. Sehingga dengan demikian BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul merealisasikan anggaran yang diberikan sudah sangat baik karena presentasenya sangat tinggi yaitu, 96,37%. Sedangkan pelaksanaan anggaran dalam belanja langsung yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul dilihat pada segi efisiensi pada tahun 2016-2019 secara keseluruhan sangat efisien. Dilihat dalam presentase mulai tahun 2016 sebesar 56,06% kemudian naik pada tahun 2017 di presentase 58,32% kemudian terendah pada tahun 2018 mencapai 55,48 % dan kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 2,9% pada tahun 2019 di presentase 58,38% yang merupakan kenaikan tertinggi di 4 (empat) tahun terakhir tetapi tergolong sangat efisien karena berada di level kurang dari 60%. Berdasarkan data tersebut jika dibuat rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan presentase 57,10% atau tergolong sangat efisien. BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul telah melakukan efisiensi anggaran pada tingkat sangat efisien. Sehingga pada rasio 57,10% BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul sudah melakukan penghematan anggaran cukup tinggi yang artinya pekerjaan yang dilakukan sangat baik dan sangat efisien.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, terdapat beberapa pesan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Pada saat proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mampu menjadi dasar bagi BAPPEDA

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Gunungkidul maupun instasi lain dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran di tahun selanjutnya serta lebih transparan kepada masyarakat.

2. Pada proses pelaksanaan anggaran BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul sudah baik tetapi masih terjadi pasang surut dalam penggunaan dan penyerapan anggaran, maka sebaiknya BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul lebih meningkatkan kinerja dan perencanaan yang baik dalam menggunakan anggaran. Kinerja yang baik maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi walaupun terjadi penghematan anggaran yang dijelaskan pada analisis varians sebaiknya BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul tetap memaksimalkan anggaran sehingga program-program dan visi misi dapat tercapai. Pada sisi pertumbuhan belanja juga mengalami penurunan dan kenaikan, dengan hal ini BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul tetap harus menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan melakukan penggunaan anggaran yang tetap transparan kepada masyarakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul mampu menjadi dasar unutk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan menyempurnakan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan juga bias dikembangkan lebih jauh tidak hanya pada satu instansi tetapi juga beberapa instansi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda C & Widiyatmini. (2012). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011. Jurnal Skripsi.

Anwar, M & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman). *Jurnal Universitas Muhamadiyah. Yogyakarta.*

Harahap, S S. (2012). Teori Akuntansi. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers.

Harsono, H. (2002). Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Rineka Cipta

Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, ed. 2.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Matatula, I F M., Sudarwadi, H., Mokodompit, M P. (2020). Analisis Anggaran dan Profitabilitas sebagai Alat Bantu Manajemen guna Mengoptimalkan Laba. *Jurnal Management Bisnis (CM-BJ). Vol. 3, No 1, 2017.*

Mohamad, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul nomor 74 tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putra, I G E D & Mintoyuwonon, D. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran pada Suku Dinas Pemerintahan di DKI Jakarta. *Jurnal Equity. Vol. 20, No 2, 2017.*

Rangian, M M., Kumajas M., Alexander S W. (2018). Ipteks Standar Pelayanan pada PT. Taspen (PERSERO) cabang Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat. Vol. 02, No. 02, 2018, Hal 289-293*

Riswandari, E. (2017). Pengaruh Reputasi, Etika dan Persepsi Keadilan terhadap Kesenjangan Anggaran *(Budgetary Slack). Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol. 2, No 1, 2017.*

Sasongko, C & Parulian (2010). Anggaran. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan *(pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta.

Sumenge, A S. (2013). Analisis Efektivitas dan Efesiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA. Vol. 1, No 3, September 2013, Hal. 74-8.*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wiradi, G. (2009). Metodologi Studi Agraria. Bogor: Sajogyo Institute.

repository.stieykpn.ac.id